



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : ENERGI BARU TERBARUKAN, BENAHI REGULASI, PACU INVESTASI
Tanggal : Selasa, 03 Maret 2020
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 23

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah kian gencar mengejar investasi untuk pengembangan energi baru terbarukan, yang ditargetkan mencapai US\$20 miliar dalam jangka 2020—2024. Pembenaan regulasi menjadi fokus utama. Muhammad Ridwan redaksi@bisnis.com. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan bahwa Indonesia masih memiliki potensi energi baru dan terbarukan sebesar 700 gigawatt (GW). “Investasi EBT sampai 2024 [diperkirakan mencapai] US\$20 miliar. Ini suatu peluang bisa kita manfaatkan dan kembangkan. Bagaimana kita bisa mengkonversi energi, di sini inovasi memang sangat penting,” katanya di Jakarta, Senin (2/3). Arifin menambahkan, sebagai negara yang memiliki iklim tropis, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk EBT. Menurutnya, Indonesia bisa memanfaatkan sumber matahari dengan penggunaan panel surya. “Kita punya atap-atap rumah bisa dipasang panel ke depan. Lahan kosong juga bisa dimanfaatkan. Biaya listrik bisa lebih hemat 15%—20%,” jelasnya. Sementara itu, draf peraturan presiden terkait dengan energi baru dan terbarukan disebut telah sampai ke meja Presiden Joko Widodo. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan draf beleid yang salah satunya akan mengatur harga jual beli listrik tersebut. “Sudah minggu lalu,” katanya di Jakarta, Senin (2/3). Kendati demikian, Sutijastoto belum dapat membeberkan kapan beleid baru tersebut akan diterbitkan. Dia menuturkan, pembenaan harga menjadi salah satu fokus pemerintah di sektor EBT guna mendorong investasi yang memiliki nilai keekonomian lebih wajar agar lebih menarik bagi para pengembang. “Untuk panas bumi dipisah, [jadi] permen [peraturan menteri]. Pak menteri [ESDM] sedang carikan formula supaya panas bumi [bisa] open kredit,” jelasnya. Selain itu, Kementerian ESDM juga berencana merevisi Permen ESDM No. 50/2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Beleid ini mewajibkan Independent Power Producer (IPP) yang melakukan penandatanganan perjanjian jual beli listrik dengan PT PLN (Persero) harus melalui proses pemilihan langsung yang dilakukan oleh BUMN setrum itu. Pemerintah berencana melonggarkan ketentuan itu, tetapi sejauh ini rencana itu masih dikaji. Ketua Masyarakat Energi Baru Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma berpendapat, proyek-proyek EBT potensial sebetulnya telah menunggu untuk bisa digarap. Namun, pelaksanaannya harus terganjal oleh regulasi yang belum juga rampung. “Rencana penerbitan Perpres tentang energi terbarukan betulbetul dinanti para investor dan diharapkan akan membawa perubahan yang signifi kan dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia,” jelasnya. Dia pun berharap regulasi baru nantinya mencakup berbagai aspek seperti harga, mekanisme pengadaan, skema usaha built, own, operate, transfer (BOOT) yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan EBT. Surya mengatakan bahwa target pemerintah untuk investasi EBT senilai US\$20 miliar hingga 2024 adalah bagian dari upaya memenuhi target bauran sebesar 23% pada 2025. Dia menilai, jika rancangan bauran itu direalisasikan seluruhnya, maka akan membutuhkan biaya investasi antara US\$95 miliar– US\$120 miliar. Hal tersebut akan menjadi pemicu daya tarik bagi pihak swasta yang akan ikut serta dalam peningkatan pemanfaatan EBT pada 2025. “Tentu pihak swasta akan senantiasa mempertimbangkan untuk ikut serta jika memberikan daya tarik ekonomi,” katanya. Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia Arthur Simatupang mengungkapkan bahwa permasalahan yang ada saat ini adalah kemampuan pembelian listrik EBT oleh PLN. “Koordinasi regulator dan PLN sebagai single buyer harus searah, jangan ada peraturan tetapi tidak dilaksanakan pembelian listrik dari PLN,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (2/3). Arthur mengatakan bahwa pihaknya berharap dengan adanya aturan yang mengatur lebih terperinci soal EBT akan melahirkan fasilitas keuangan tambahan kepada PLN untuk membantu membeli tenaga listrik EBT. PERDA RUED Pada perkembangan lain, Dewan Energi Nasional menargetkan 12 daerah akan menyelesaikan peraturan daerah (perda) rancangan umum energi daerah (RUED) tahun ini guna memaksimalkan potensi EBT. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto menuturkan bahwa rancangan umum energi nasional (RUEN) terkait pengembangan EBT akan bergantung pada pemanfaatan energi dari daerah tersebut. “Jadi, keberhasilan energi mix atau EBTKE daerah itu mempengaruhi angka dari energi nasional, nah sekarang kami lagi fokus untuk menyusun RUED itu dituangkan dalam Perda,” katanya di Jakarta, Senin (2/3). Berdasarkan data Dewan Energi Nasional (DEN) per 13 Februari 2020, sebanyak 16 provinsi telah menetapkan Perda yang berkaitan dengan RUED. Adapun, provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Lampung, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Aceh, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatra Barat, dan Kalimantan Tengah. Di samping itu, Yogyakarta telah mendapatkan persetujuan oleh DPRD dan sedang dalam proses fasilitasi dan registrasi di Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu, sebanyak 12 provinsi yang sudah memasukan RUED dalam proposal perda 2020 dan sedang melakukan pembahasan dengan DPRD di antaranya adalah Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. (Yanita Petriella)